

**ANALISIS DAMPAK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN  
DI MASA PANDEMI**

**Atla Tegar Habib Amrullah dan Mutiara Devi Zumrotussaadah**

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail korespondensi: [atlahabib43@gmail.com](mailto:atlahabib43@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di tengah pandemi Covid-19 dan tingginya tingkat pengangguran membuat UMKM harus mampu bersaing menghadapi krisis ekonomi, seperti meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam dan penggunaan teknologi dalam memperluas sektor pemasaran. Pertumbuhan ekonomi setiap tahun ditentukan oleh dinamika dan perkembangan perekonomian suatu daerah, namun perekonomian suatu daerah pada awalnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Tujuan penelitian ini guna menganalisis dampak pengembangan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian observasi dengan melibatkan pelaku ekonomi dari UMKM untuk mengumpulkan data terkait dengan dampak pengembangan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menggunakan metode wawancara dengan teknik analisis data menggunakan logika deduksi dengan membandingkan teori yang melatar belakangi bentuk permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pengembangan UMKM untuk meningkatkan sektor ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pemberian modal dan kurang maksimalnya bantuan lain dalam pengembangan UMKM. Dalam pengembangan UMKM terdapat faktor pendukung yaitu SDM yang melimpah atau tenaga kerja yang memadai, modal usaha ringan, dan adanya kesepakatan harga jual antar produsen dan konsumen. Terdapat pula, faktor penghambat dalam pengembangan UMKM yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan dan dapat ditemukan solusi bahwa UMKM mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus sebagai upaya penanganan kemiskinan dan pengangguran di masa pandemi. Serta dapat membawa dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia.

**Kata Kunci:** UMKM, Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran

## PENDAHULUAN

### Latar belakang

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting dalam kehidupan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan konflik negara di bidang perekonomian dalam jangka panjang, terdapat pula proses pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan *Modern Economic Growth*. Pertumbuhan ekonomi didasari pada pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Sebagai contoh, adanya kesejahteraan yang tercermin dalam peningkatan output perkapita sekaligus memberikan banyak alternatif dalam memasok barang dan jasa, serta diikuti dengan daya beli yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2004-2014 mengalami fluktuasi. Fluktuasi PDB tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,98% dan paling rendah pada tahun 2009 sebesar 4,54%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2009 dikarenakan kondisi perekonomian global yang tidak stabil, mengalami tekanan krisis yang dihadapi perekonomian Indonesia pada beberapa tantangan berat tahun 2009. Namun, pada awal tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Adanya wabah virus (*Coronavirus Disease*) yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, yaitu adanya *Coronavirus Disease*. Dengan adanya *Coronavirus* yang melanda seluruh Negara, sekitar 200 negara lebih. Sehingga, pada 30 Januari 2020 World Health Organization menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberitakan bahwa wabah *Coronavirus* sebagai pandemic global. *Coronavirus* (COVID-19) memiliki dampak yang luar biasa

bagi pertumbuhan ekonom yang menyebabkan tingkat perekonomian menurun karena banyaknya PHK, pengangguran, dan kemiskinan terkhusus di Indonesia. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan konflik mendasar terjadinya kemiskinan di Indonesia. Hal ini mempengaruhi faktor pendapatan Negara yang berkurang, karena persentase Negara dapat diukur dari jumlah pendapatan masyarakat Indonesia yang berpenghasilan dibagi dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia. Kerugian nasional akibat COVID-19 yang mendasar adalah kerugian agregat secara nasional. Karena bersifat makro, maka kerugian ini berpengaruh pada pelaku ekonomi skala besar atau Negara harus menyusun (revisi) APBN. Salah satu cara menghitung kerugian dapat menggunakan acuan Produk Domestik Bruto (PDB), yang dapat mengakumulasi total produksi Negara selama setahun.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu Negara. Dalam pertumbuhan ekonomi Negara akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Syarat utama Negara untuk menuju pertumbuhan ekonomi stabil adalah menekan angkakemis-kinan. Namun, Indonesia mempunyai permasalahan yaitu dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi konflik utama di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan BPS, bahwa jumlah penduduk Indonesia yang telah hidup di bawah kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2021 Februari tercatat sekitar 8,75 juta jiwa atau 26,26%. Angka pengangguran

tersebut menurun menjadi 10,44% dibandingkan pada Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang. Adapun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 6,26% pada Februari 2021. TPT tersebut naik dibandingkan 1,32% poin dibandingkan Februari 2020 yang sebesar 4,99%. Namun, angkanya turun 0,81% poin ketimbang Agustus 2020 yang sebesar 7,07%. TPT tertinggi pada Februari 2021 tercatat berada di perkotaan mencapai 8%. Sementara, TPT di perdesaan sebesar 4,11%. Kondisi masyarakat yang hidup dilingkungan kemiskinan menderita kondisi kesehatan buruk, kekurangan gizi, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk, dan akses pelayanan publik yang kurang memadai. Berdasarkan data yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari BPS, dalam kurun waktu 20 tahun (1976-1996) jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 54,2 juta jiwa atau 40% total penduduk menjadi 22,5 juta jiwa atau 11% dari total penduduk. Terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 mengakibatkan penurunan drastis pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi mengeluarkan keterpurukan penduduk dari jurang kemiskinan akibat krisis, melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan ases terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, diciptakannya pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang memiliki tujuan untuk membuka peluang masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi pekerjaan bagi masyarakat miskin, dan pemerintah juga menggalakkan Unit Usaha sebagai bentuk pertumbuhan

ekonomi dalam skala nasional. Pergerakan pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional bergantung pada dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya memiliki faktor penggerak yakni kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha dapat dikategorikan dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari perekonomian daerah dan nasional. Jumlah UMKM mencapai 99% dari komunitas unit usaha yang hadir, dan telah menampung lebih dari 92% jumlah tenaga kerja. Jika, dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.0% UMKM memberikan hasil laju pertumbuhan sekitar 3.0% lebih tinggi daripada laju pertumbuhan usaha besar.

Data ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan koperasi dan UMKM tergolong strategis. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah tipikal usaha yang dapat bertahan walaupun Negara sedang mengalami krisis ekonomi. 99% pelaku usaha ekonomi mayoritas adalah pelaku usaha UMKM yang lahir secara signifikan dan mampu menjadi penopang stabilitas perekonomian dalam skala nasional. Ketika terjadi krisis ekonomi secara global UMKM mampu bergerak, pemerintah telah memberikan upaya dan pemberdayaan berupa kebijakan program untuk menguatkan sektor usaha UMKM.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah pengembangan UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama masa Pandemi COVID-19?
2. Apakah pengembangan UMKM dapat menanggulangi kemiskinan dan pengangguran selama masa Pandemi COVID-19?

## Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini guna menganalisis Tujuan penelitian ini guna menganalisis dampak pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk tumbuh perkembangan perekonomian. Secara teoritis hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan memperluas wawasan dalam hal pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan manfaat bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang berarti bagi penulis dalam memahami secara mendalam mengenai isu-isu ekonomi di Indonesia, serta memberikan sentuhan hangat dalam mengasah keterampilan dalam melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan isu-isu nasional dalam negara.

## KAJIAN PUSTAKA

Definisi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Indonesia merupakan salah satu negara dengan predikat sebagai negara berkembang, salah satu faktanya adalah predikat yang diberikan oleh *International Monetary Fund* IMF. Meskipun begitu IMF menyebutkan bahwa Indonesia masuk ke peringkat 5 diantara 10 negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) teratas di dunia yang dihasilkan pada tahun 2024 mendatang. Hal ini dapat terjadi disebabkan perkembangan dunia industri 4.0 di Indonesia yang sangat pesat. Salah satu dari banyaknya industri yang

berkembang di Indonesia adalah usaha mikro kecil menengah atau yang biasa disingkat UMKM.

UMKM adalah suatu unit usaha mandiri yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha dan non-perusahaan yang bergerak secara produktif dalam menghasilkan suatu produk di semua sektor bidang perekonomian suatu negara. Orang yang menjalankan atau bergerak di UMKM menurut *The American Heritage Dictionary* disebut sebagai seorang wirausahawan (*entrepreneur*) yang didefinisikan sebagai seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba dan memperkecil rugi. Definisi lain UMKM merupakan suatu usaha yang hanya memiliki ruang lingkup pasar yang kecil, tenaga kerja yang sedikit, dan dikelola sendiri oleh pemilik usaha (Simmons, Armstrong & Durkin, 2008). *World Bank* menyebutkan bahwa dapat disebut sebagai UMKM apabila memenuhi dua dari tiga kriteria yaitu mengenai ukuran aset atau penjualan tahunan serta kekuatan dari karyawan yang menjalankan usaha tersebut. Dalam hal ini alat ukur untuk membedakan suatu usaha dikatakan sebagai usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah berdasarkan tiga hal. Pertama nilai awal aset yang dipunyai (tidak termasuk tanah, bangunan, listrik dan perhiasan administrasi seperti akta perjanjian ataupun kontrak). Kedua, omzet yang didapatkan rata-rata per tahun. Ketiga, jumlah pekerja tetap yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk tersebut. Akan tetapi, ketiga hal tersebut belum bisa disebut secara penuh alat ukur yang baku dan disepakati secara internasional dikarenakan setiap negara memiliki alat ukur sendiri-sendiri penentuannya. Menurut BPS sendiri di Indonesia memberikan definisi UMKM

berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha, yakni Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang. Sedangkan, Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Di Indonesia sendiri memiliki dasar hukum dalam pendefinisian UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 Ayat 2 sampai 4 disebutkan definisi dari UMKM bahwa mengenai usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Kemudian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

### **Penggolongan dan Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menggolongkan UMKM dengan beberapa kriteria yaitu :

1. Kriteria Usaha Mikro
  - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Kriteria Usaha Kecil
  - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
3. Kriteria Usaha Menengah
  - a) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Adapun ciri-ciri UMKM adalah menggunakan teknologi sederhana atau manual sehingga mudah dilakukan alih teknologi, bahan baku mudah diperolehnya, memiliki keterampilan dasar umumnya didapat secara turun temurun, peluang pasar cukup luas, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sebagian besar produknya dipasarkan di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor (Halim, 2020)

## **Tujuan dan Manfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki banyak sekali tujuan, diantaranya adalah mengembangkan ketrampilan kewirausahaan, memperluas dan menambah produk di pasar yang ada baik pasar lokal maupun pasar internasional, sebagai salah satu penggerak perekonomian negara, melatih jiwa untuk mengambil risiko dengan berwirausaha, mempersiapkan proposal untuk merencanakan bisnis untuk lebih bisa mempresentasikan ke lembaga keuangan. Selain tujuan adapun manfaat dari UMKM diantaranya adalah membuka lapangan pekerjaan baru, menyumbang nilai Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan pendapatan daerah, mampu mengembangkan pemberdayaan masyarakat yang lebih produktif, memperkecil angka kemiskinan serta pengangguran, mengembang-kansikap toleransi dan kerja sama antar sesama, menggali potensi sumber daya manusia di masyarakat, mengembangkan usaha yang sebelumnya sudah ada menjadi lebih optimal

## **Prinsip, Asas dan Klasifikasi UMKM**

Pada prinsipnya usaha mikro kecil menengah memiliki prinsip dasar dalam pemberdayaannya dengan menumbuhkan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan berdiri sendiri atau prakarsa sendiri, sebagai perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensinya masing masing, peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Adapun asas-asas dalam

UMKM diantaranya kebersamaan, kekeluargaan, efisiensi berkeadilan, kemandirian, demokrasi ekonomi, keseimbangan kemajuan, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian UMKM memiliki klasifikasi diantaranya adalah :

1. *Livelihood Activities* merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencar nafkah. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise* merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Salah satu contohnya adalah pekerja swasta di UMKM.
3. *Small Dynamic Enterprise* merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak termasuk ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

## **Peran UMKM dalam Menumbuhkan Ekonomi Negara**

Usaha Mikro Kecil Menengah yang tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia sangat memiliki peran penting dan bisa disebut sebagai salah satu peran vital dalam membangun perenokomian bangsa Indonesia. Menurut Rudjito (2003) mengemukakan bahwa pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. UMKM bisa

disebut sebagai hal yang vital dikarenakan berjalannya kegiatan ekonominya suatu negara dipengaruhi dari para tenaga kerja yang bergerak di UMKM ini menimbulkan kontribusinya untuk membentuk dan menumbuhkan PDB sangat besar bagi pendapatan suatu negara, jika dibandingkan dengan kontribusi dari usaha besar lainnya. Dapat diibaratkan UMKM merupakan suatu roda garda terdepan dari sebuah perekonomian negara, bisa dikatakan demikian dikarenakan tanpa adanya UMKM suatu negara tidak bisa memproduksi barang yang bisa mendorong perekonomian negara. Berdasarkan kontribusi UMKM terhadap PDB per-sektor dapat diketahui bahwa kontribusi UMKM terbesar berada di sektor PPKP dengan unit UMKM sebesar 49.58%, disusul dengan sektor PHR dengan 29.56%. Industri pada sektor ini sangat potensial dikembangkan sejak dari mikro, dan ada peluang dikembangkan untuk menjadi industri besar.<sup>1</sup> Tidak hanya itu dalam perkembangannya UMKM memiliki pengaruh yang sangat besar dan penting dalam laporan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2005 distribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 1.480 triliun (54 persen), sementara dari usaha besar sebesar Rp. 1.249 Trilyun (46 persen). Data juga menunjukkan bahwa tenaga kerja yang dapat diserap dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) cukup besar bila dibandingkan dengan usaha skala besar.<sup>2</sup>

Dan pada masa sekarang tahun 2021 menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia kontribusi UMKM ditargetkan bisa untuk mencapai 62,36% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan naik jadi 65% dari PDB pada tahun 2024. Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB sekitar 61,07%. Tidak hanya itu, ekspor UMKM yang saat ini masih ada pada kisaran 14%, ditargetkan naik menjadi 15,12% di 2021, dan 21,60% di 2024. Adapun kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain seperti Singapura 41% dan Tiongkok 60%. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Masa Pandemi melalui UMKM.

Jika dikaji lebih lanjut berdasarkan data di atas maka bisa dikatakan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dan besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara jadi dapat disimpulkan kekuatan dari UMKM sendiri bisa untuk mengatasi beberapa persoalan mengenai angka pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia dikarenakan bisa menyerap banyak lapangan kerja, teknologi yang digunakan sederhana dan bahan baku yang ekonomis untuk dipeoleh menjadi poin utama dalam bergeraknya suatu usaha dan ini menjadikan dampak positif dari pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Masa pandemi menyebabkan banyak UMKM mengalami problematika baik dari keadaan bencana pandemi maupun dengan kebijakan pemerintah yang ada, akibat dari adanya kebijakan pemerintah salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta anjuran untuk tetap di rumah saja menyebabkan banyak UMKM terdampak imbasnya. Dikutip dari media Antara pada bulan Mei 2020 menyebutkan bahwa berdasarkan data dari kementerian koperasi 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus

---

<sup>1</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah...*, hal. 132

<sup>2</sup> Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, *Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Tugas (SATGAS) Konsultasi Keuangan/Pendampingan UMKM Mitra Bank (KKMB)*, 2006, halaman i.

corona (Antara, Mei 2020).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak usahanya karena pandemi virus corona yang menyebabkan banyak orang terkena PHK dan mengalami kemiskinan mendadak. Akan tetapi, keadaan ini bisa diatasi apabila UMKM bisa memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal salah satunya adalah penggunaan media sosial atau penggunaan teknologi dikarenakan terjadi peningkatan belanja online sebesar 400% sebagaimana disampaikan oleh Ahmad M. Ramli selaku Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo yang akan memprediksi terus meningkat sampai situasi pandemi mulai reda ataupun masyarakat bisa bergerak normal.<sup>3</sup>

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) ataupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Menurut Kuznets (dalam Sukirno, 2006:132), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Sedangkan, menurut Untoro (2010:39), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan

jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Maka dari itu, dapat disebut bahwa kenaikan output per kapita dalam waktu yang panjang dengan penekanan tiga aspek meliputi proses, output perkapita dan jangka panjang yang bisa diartikan peningkatan pendapatan riil. Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur menggunakan *Gross National Product (GNP)* tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya.

### **Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi**

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, dan sumber daya modal. Faktor sumber daya alam sendiri merupakan faktor yang berperan sebagai bahan baku dalam terciptanya suatu produk untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Kemudian faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam proses pembangunan, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang mempengaruhi proses kinerja dari suatu proses pertumbuhan ekonomi dikarenakan memiliki peran sebagai media pendorong. Kemudian faktor budaya merupakan faktor yang berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan. Tidak hanya itu, faktor sumber daya modal dibutuhkan juga untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas dari penggunaan IPTEK.

### **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini ditujukan dengan tujuan mengetahui dampak pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam

<sup>3</sup> Gusti, "Transaksi Penjualan Online Naik 400 Persen di Masa Pandemi Covid-19", (Universitas Gadjadara: Liputan/Berita, Mei 2020), diakses melalui <https://ugm.ac.id/berita/19452-transaksi-penjualan-online-naik-400-persen-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada 9 Juni 2021



pandemic COVID-19 terhadap pengangguran dan kemiskinan dalam upaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini. Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah ada pada obyek penelitian atau data hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, data tersebut dapat bersumber dari dokumen organisasi atau institusi lain yang dianggap berkaitan dengan masalah yang di bahas oleh peneliti, pengumpulan data terkait dengan dokumen mengenai dampak pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menggunakan metode wawancara dengan teknik analisis data menggunakan logika deduksi dengan membandingkan teori yang melatar belakangi bentuk permasalahan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002: 152), dalam penelitian Moh Arif Novriansyah (2018), Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa literatur seperti buku, majalah, brosur, dan karangan lain yang memiliki hubungan dengan objek yang sedang diteliti. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan proses pengambilan data yang dilakukan penulis memiliki arti tidak perlu terjun secara langsung ke dalam lapangan, tetapi dengan menggunakan berbagai sumber literatur atau referensi yang mendukung penelitian ini. Selain itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu mencatat dan menyimak informasi secara reduksi data, display data dan melakukan gambaran kesimpulan mengenai studi literatur

untuk dapat dikembangkan dalam penelitian yang ditulis penulis ini. Sedangkan, mengenai validasi datanya menggunakan cara triangulasi sumber data.

## **BAGIAN ISI dan PEMBAHASAN**

### **Analisis Pengembangan UMKM Dapat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Masa Pandemi COVID-19**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedikit terhambat dengan adanya penyebaran Covid-19, dampak perlambatan ekonomi mulai dirasakan secara global di dalam negeri. Banyak pelaku usaha UMKM menggunakan sistem PHK atau meliburkan karyawannya dan bahkan menutup usahanya. Salah satu penyebab perlambatan ekonomi karena adanya penurunan omzet penjualan, *Work From Home* (WFH) sangat berpengaruh terhadap ekonomi UMKM, pelaku UMKM mengalami kerugian yang cukup tinggi dan penurunan pendapatan yang drastis akibat penerapan *physical distancing* serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kegiatan interaksi antar penjual dan pembeli berkurang dan membuat masyarakat mengurangi aktifitas ekonomi secara drastis. Berdampak pada bisnis dalam sektor manufaktur, transportasi, dan pariwisata yang mengalami penurunan.

Sejak adanya Covid-19 terjadi suatu perlambatan ekonomi dalam berbagai bidang sebagai contoh, Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terdampak oleh penyebaran virus ini. Ketua Bali Tourism Board (BTB) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan telah terjadi 40.000 pembatalan hotel dengan kerugian mencapai Rp1 triliun setiap bulan (Kontan, 5 Maret 2020), penurunan ekonomi terhadap sektor pariwisata,

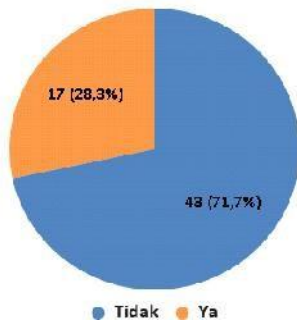
berdampak pada usaha makanan dan minuman mikro. Kerugian yang didapat dalam pelaku usaha makanan dan minuman sekitar 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah di angka 0,07%. Pengaruh virus Covid-19 terhadap unit kerajinan dari kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8% (katadata.co.id, 2 Maret 2020). Padahal pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada ketahanan UMKM saat

menghadapi krisis.<sup>4</sup> Dapat dilihat dengan beberapa data statistik yang disajikan di bawah.

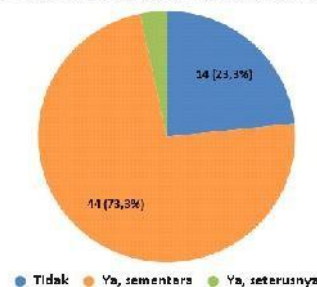
Pada Grafik 1 dapat dilihat, bahwa selama masa pandemi COVID-19 kegiatan usaha sebagian pelaku UMKM tidak berjalan seperti biasa bahkan harus menutup usaha untuk sementara waktu dikarenakan perlambatan ekonomi.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kredit usaha yang diambil oleh sebagian pelaku UMKM. Mereka yang kredit usahanya mengalami kemacetan selama pandemi COVID-19 memerlukan suntikan dana/modal usaha agar tetap dapat bertahan selama periode pandemi masih berlangsung.<sup>5</sup>

**Kegiatan Usaha tetap Berjalan Seperti Biasa**

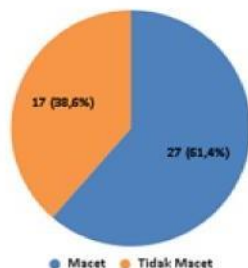


**Menghentikan Kegiatan Usaha selama Periode Pandemi COVID-19**

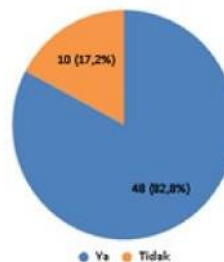


**Grafik 1** Survei UGM Kegiatan Usaha Selama Pandemi COVID-19

**Kredit Usaha selama Pandemi COVID-19**



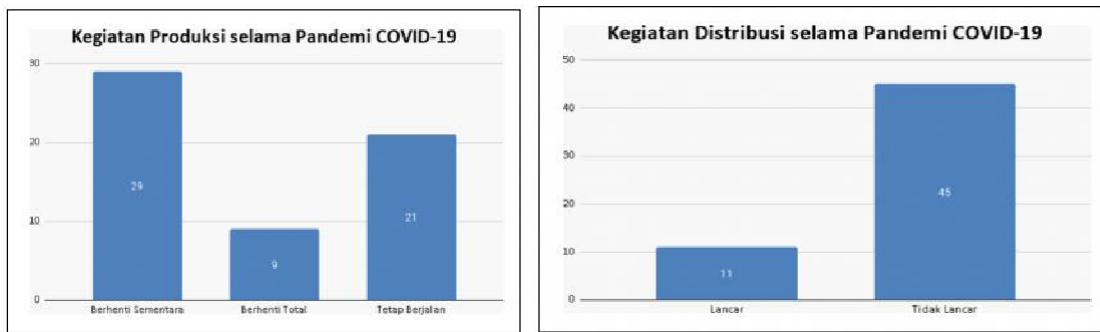
**Perlu Suntikan Dana**



**Grafik 2** Survei UGM Stimulus Usaha selama Pandemi COVID-19

<sup>4</sup> 380-1777-1-PB.pdf

<sup>5</sup> Dampak Awal Pandemi Covid-19 Terhadap UMM, Tim Yamnas DPKM-UGM MEI



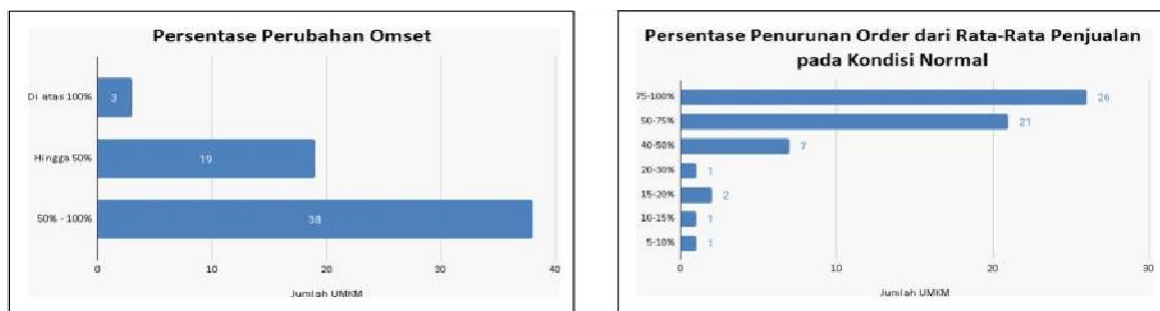
**Grafik 3** Survei UGM Kegiatan Produksi dan Distribusi Selama Pandemi COVID-19

Pada Grafik 3, tampak banyak pelaku usaha UMKM dalam kegiatan pemasaran tidak berjalan dengan lancar, bahkan ada yang terhenti karena pasar sepi dan adanya peraturan untuk pembatasan sosial oleh pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan pemasaran tidak berjalan secara maksimal.

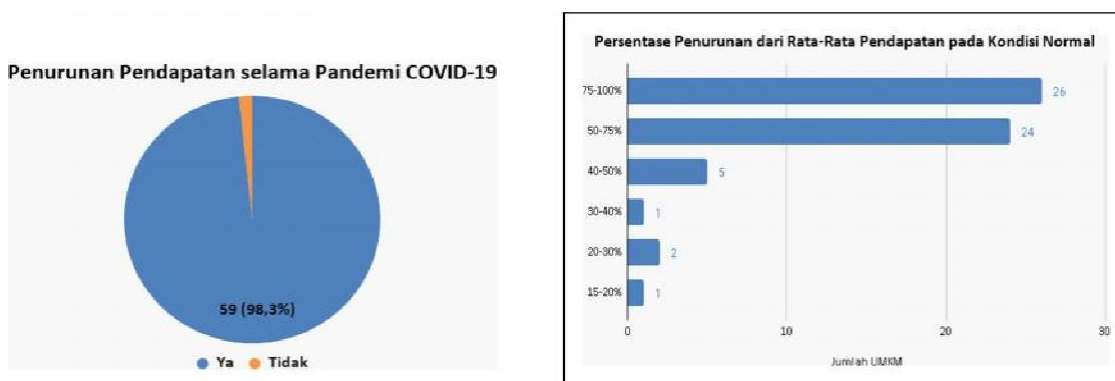
Dijelaskan bahwa selama pandemi COVID-19 terdapat pelaku usaha UMKM yang mengalami

perubahan omset atau pemasukan yang bisa mencapai 50-100% dan persentase penurunan order sekitar 75-100% dari rata-rata penjualan pada kondisi normal. Hal ini mempengaruhi penurunan pendapatan (lihat Grafik 4).

Selama pandemi COVID-19, hampir seluruh responden (59 dari 60 UMKM) mengalami penurunan pendapatan dikarenakan daya beli konsumen yang menurun dan minimnya bahan



**Grafik 4** Survei UGM Kendala Selama Pandemi COVID-19



**Grafik 5** Survei UGM Penurunan Pendapatan Selama Pandemi COVID-19

baku. Berdasarkan Grafik 5, persentase penurunan pendapatan para pelaku UMKM kebanyakan mencapai 75- 100% dari rata-rata pendapatan pada kondisi normal.<sup>6</sup>

### **Analisis Pengembangan UMKM Terhadap Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia**

Penyebaran Covid-19 secara yang menjadikan pandemi dunia menyebabkan banyak sekali dampak baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Salah satu aspek yang terdampak dikarenakan pandemi ini adalah kegiatan perekonomian masyarakat. Karena kebijakan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Besar-Besaran dan pembatasan ruang publik termasuk kegiatan *work from home* menyebabkan banyak pihak tercekik perekonomiannya salah satunya adalah orang yang bergerak di bidang UMKM. Mereka yang bergerak di UMKM mulai merasakan dampak penurunan yang sangat signifikan. Para pelaku yang bergerak di bidang UMKM banyak yang mengambil langkah seperti meliburkan karyawannya bahkan sampai memutuskan hubungan kerjanya/kontraknya hingga menutup sementara usahanya dikarenakan penurunan omzet penjualan. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengurangan aktivitas interaksi secara langsung. Tentunya hal tersebut sangat memprihatinkan karena menyebabkan Indonesia mengalami resesi dan mengalami kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran. Maka dari itu kami akan memberikan sebuah gagasan solusi agar dapat mengatasi beberapa persoalan tersebut.

<sup>6</sup> Dampak Awal Pandemi Covid-19 Terhadap UMM, Tim Yamnas DPKM-UGM MEI 2020

#### **a. Transformasi Media Digital di Bidang UMKM**

Dalam catatan Bank Indonesia sebanyak 72,6% usaha mikro kecil dan menengah mengalami dampak karena pandemi. Bahkan, banyak pengusaha yang mengalami penurunan penjualan hingga kesulitan modal sampai bahan baku. Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada 3 April 2020 menggambarkan, bahwa Indonesia berada di urutan pertama Negara di ASEAN yang didasarkan pada akumulasi kematian yang terjadi karena Covid-19 dan Ibukota Jakarta sebagai episentrum penyebaran terbesar di Indonesia. Karena pandemi Covid-19 masyarakat mengubah kebiasaannya dalam melakukan aktivitas, termasuk berkenaan dengan berbelanja. Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial untuk menghambat penyebaran virus corona membuat masyarakat memilih untuk belanja melalui media *online shop* atau secara daring. Pada Toko pedia ternyata lebih disukai oleh pembeli laki-laki yakni sebanyak 22% dibandingkan pembeli wanita sebesar 9%. Begitupun dengan Lazada yang lebih disukai oleh pembeli laki-laki (14%) dibandingkan dengan pembeli wanita (10%). Adapun Bukalapak disukai pembeli wanita sebanyak 2% dan disukai pembeli laki-laki sebanyak 9%. Berdasarkan usia, Shopee dan Lazada banyak digemari oleh mereka yang berusia antara 19-30 tahun, namun Tokopedia dan Bukalapak lebih disukai oleh mereka yang berusia 35 tahun ke atas.<sup>7</sup>

Karena hal tersebut menjadikan perubahan perkembangan secara cepat media digital. Para

<sup>7</sup> Iskandar, "Daftar Platform Belanja Online yang Paling Diburu Orang Indonesia Selama Pandemi", (Liputan6.com:Tekno, Internet, 07 Juli 2020), diakses melalui <https://www.liputan6.com/teknoread/4297866/daftar-platform-belanja-online-yang-paling-diburu-orang-indonesia-selama-pandemi-pada-15-Desember-2020-pukul-15.00-WIB>.

penjual UMKM akhirnya harus memilih untuk tetap memilih strategi pemasaran seperti biasanya atau melalui komunikasi ekonomi digital. Tentunya apabila melihat mengenai kondisi sekarang, pelaksanaan kegiatan pemasaran lebih optimal dengan memanfaatkan IPTEK yang ada untuk membuat *online shop* sebagai lapak untuk berjualan dengan menambahkan sedikit inovasi yang ada agar produk UMKM bisa dilihat lebih menarik dari produkluarnegeri, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam hal ini pemerintah harus berupaya secara maksimal untuk membantupara pelaku UMKM di bidang digital dikarenakan masih banyak pelaku UMKM yang kurang menguasai untuk mengoperasikan layanan *online shop*, serta untuk mengatasi terjadinya kasus penipuan kepada UMKM oleh pembeli. Pemerintah harus memfalitasidanmemberikan wadah untuk para pelaku UMKM yang kurang memahami mengenai ha-hal tersebut dengan mengadakan sosialisasi yang lebih gencar. Perlu dipersiapkan penyediaanjasalayananjualbeli yanglebihaman bagi pelaku UMKM.

b. Optimalisasi Upaya UMKM Untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Banyaknya PHK di masa pandemi menyebabkan jumlah lapangan pekerjaan semakin terbatas, jumlah pengangguran bertambah, dan jumlah masyarakat yang berada pada garis kemiskinan juga bertambah. Maka dari itu peran serta untuk mengoptimalkan UMKM diperlukan untuk menanggulangi hal-hal tersebut di atas. Tidak hanya di bidang IPTEK saja yang perlu dibenahi, tetapi bagaimana mengoptimalkan penyaluran modal yang diberikan kepada para pelaku UMKM. Dalam penyaluran modal, perlu dibuat regulasi khusus agar tidak menuai banyak masalah ke depannya

dikarenakan selama ini banyak orang yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, tetapi dana tersebut tidak digunakan untuk pengembangan UMKM tetapi untuk hal lain. Maka dari itu pemerintah wajib hukumnya memberdayakan masyarakat serta mengawasi masyarakat lebih baik lagi agar kedepannya perekonomian berangsur membaik dan bisa mengurangi angka pengangguran serta angka kemiskinan baik di pusat maupun di daerah. Kemudian pemberian bantuan berupa pengurangan intensif perpajakan di bidang UMKM agar lebih meringankan para pelaku usahanya dengan tidak hanya pengenaan tarif PPh sebesar nol persen diberikan selama enam bulan yaitu periode April s.d. September 2020.

Dengan banyaknya angka pengangguran yang terjadi saat ini menjadikan bukti bahwa keadaan UMKM bisa saja berubah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan dikarenakan beberapa kebijakan pemerintah saat ini belum optimal dalam pemberdayaan UMKM sendiri, jika belum optimal saat ini sudah banyak sekali angka pengangguran yang berkurang apalagi nanti ketika sudah dioptimalkan dikarenakan pandemi Covid-19.

## PENUTUP

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Dengan adanya penyebaran pandemi Corona (COVID-19) telah terjadi beragam konflik termasuk dalam sektor perekonomian, banyak sektor yang terpuruk termasuk pelaku usaha UMKM. Dampak COVID-19 dapat merusak rantai pasokan ekonomi, memperlebat jalannya perekonomian, penurunan kapasitas produksi, penutupan pabrik, hingga larangan berpergian.

2. Akibat dampak dari pandemi COVID-19 pemerintah telah memberikan sema perlindungan UMKM yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan punah, (b) intensif pemberian pengurangan pajak bagi UMKM, (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, (d) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM, (e) menempatkan kementerian, BUMN dan pemerintah daerah sebagai penyangga produk UMKM, dan (f) pelatihan secara *e-learning*.
3. Banyak industri yang terdampak dalam era pandemi COVID-19 meliputi sektor manufaktur, transportasi, dan pariwisata.
4. Membangun sebuah strategi jangka panjang dan jangka pendek yang perlu dikembangkan dan dipertimbangkan oleh pemerintah guna mendukung tingkat kestabilan ekonomi pada saat Indonesia sedang genting.
5. Perlu diadakan strategi ulang kepada berbagai pihak untuk menangani krisis ekonomi dikala genting, agar dapat membangkitkan UMKM dan agar bisa *survive* di tengah pandemi COVID-19 untuk berusaha stabil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Imamul & Gina, Hadi. 2009. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Asfia, Murni. 2006. *Ekonomika Makro*. Bandung: Refika Aditama.
- Boediono. 2005. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Budi Hartono, Siti Indayani. 2020. *Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19*. Fakultas Ekonomi Univeristas Tidar. Magelang.
- Dani Sugiri. 2020. *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Djoko Santoso TH, Sigit Santoso, Bin Hasri. *Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Daerah di Kabupaten Ngawi*. Magister Pendidikan Ekonomi Program PASCASARJANA UNS.
- Idris, Muhammad. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krugman, Paul R. 2005. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Indeks.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Rahmi Rosita. 2020. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia, Studi Administrasi Bisnis. *Jurnal Lentera Bisnis*. Politeknik LP3I. Jakarta.
- Tim Yamnas DPKM-UGM. 2020. *Dampak Awal Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM*. UGM UMKM. Jogjakarta.
- Rinaldi Syahputra. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Samudra.
- Wibowo Hadiwardoyo. 2020. *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah. Depok, Jawa Barat.

\*\*\*